

# Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah



**Capacity Building Bappeda Kabupaten Tabalong  
Grand Alia Prapatan Hotel-Jakarta, 12 Juni 2015**





## Dadang Solihin

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah *Senior Strategic Planner* pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com) HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

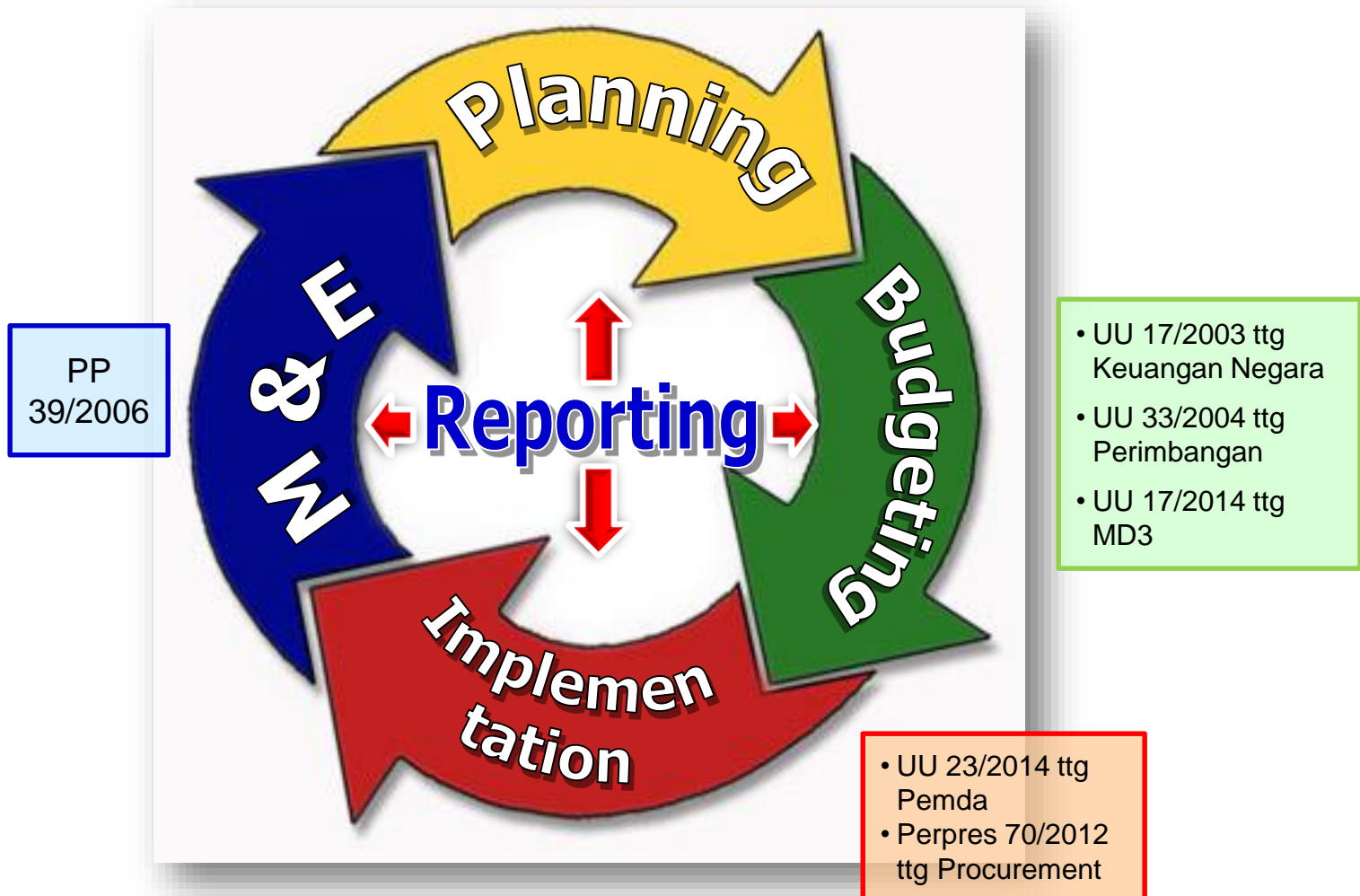
# Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Sinergi RPJMD-Renstra SKPD
- Proses Perencanaan
- Status Hukum Dokumen Perencanaan
- UU25/2004 tentang SPPN
- Pelaku Pembangunan: *Stakeholders*
- Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
- Sinergi Stakeholders
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan

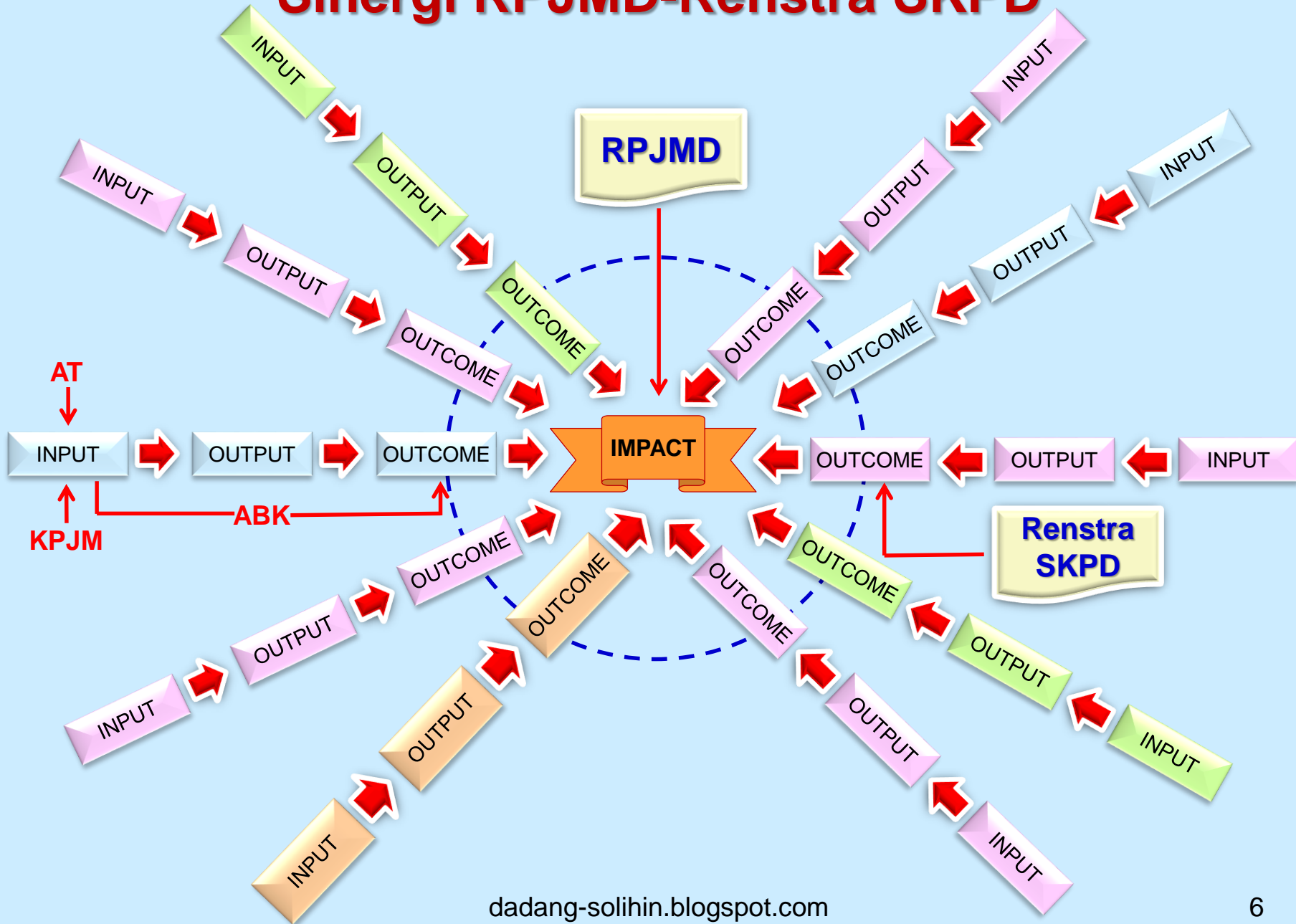


# Siklus Manajemen Pembangunan

UU25/2004  
ttg SPPN



# Sinergi RPJMD-Renstra SKPD



# Proses Perencanaan



## Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



## Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



## Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



## Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

# Status Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)



# UU25/2004 tentang SPPN

## SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



# Reformasi Sistem Penganggaran

1/2

## PARADIGMA LAMA

### Visi:

- Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

### Misi:

- Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan
- Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

## PARADIGMA BARU

### Visi:

- Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih

### Misi:

- Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang dituangkan dalam RKP/D
- Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

# Reformasi Sistem Penganggaran

## Paradigma Lama

### Penganggaran Berbasis:

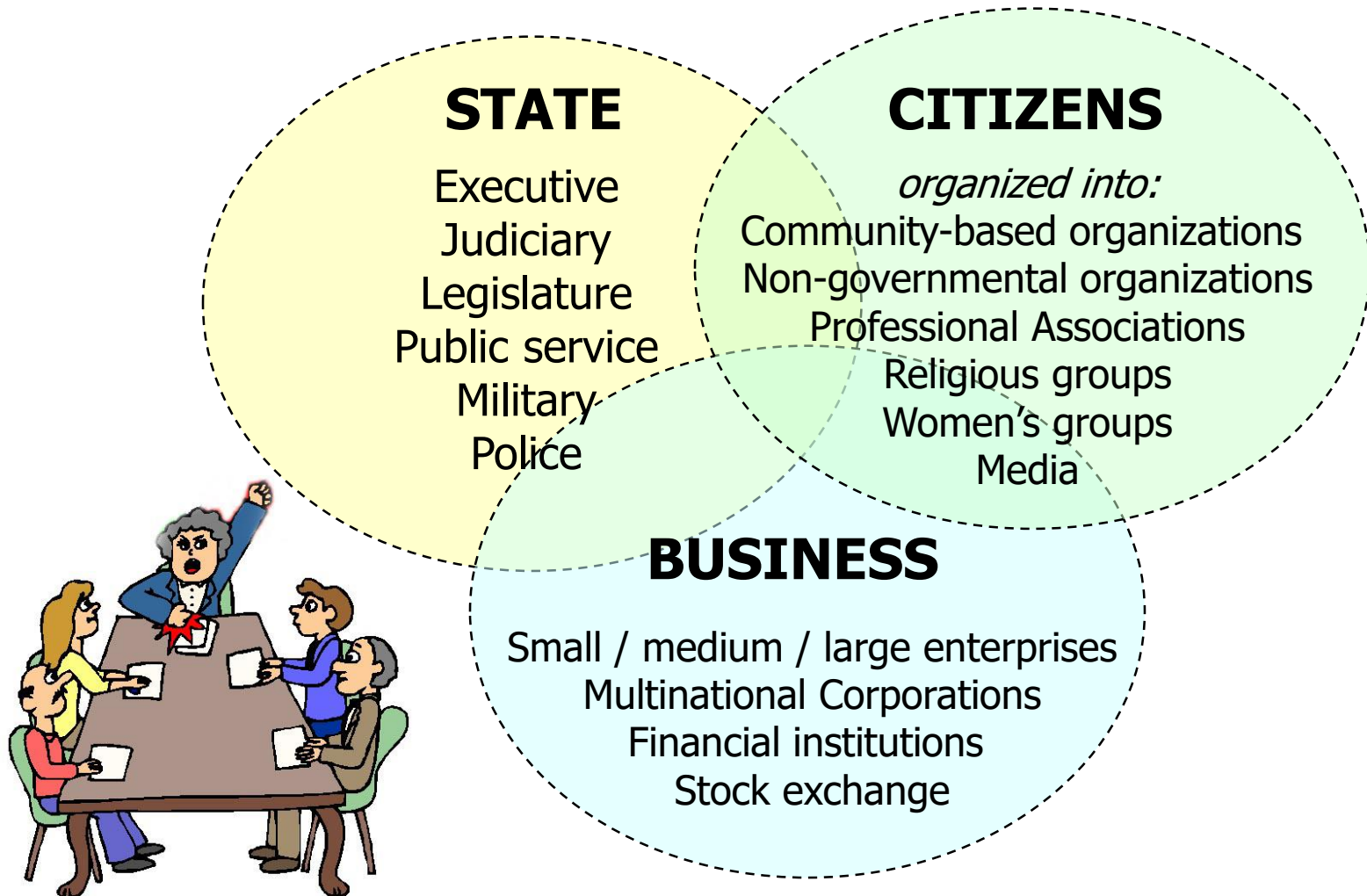
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan

## Paradigma Baru

### Penganggaran dengan Pendekatan:

1. Penganggaran Berbasis Kinerja
2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu

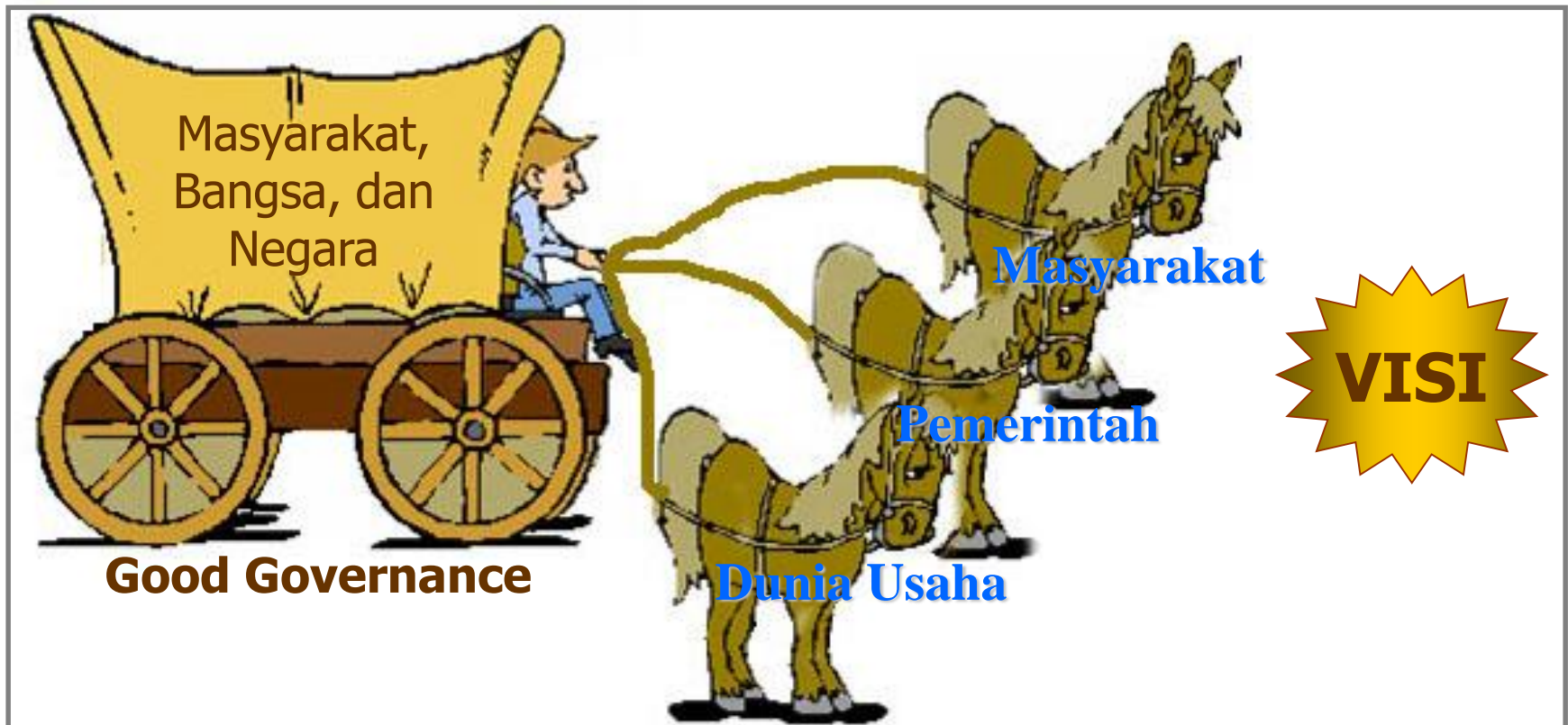
# Pelaku Pembangunan: *Stakeholders*



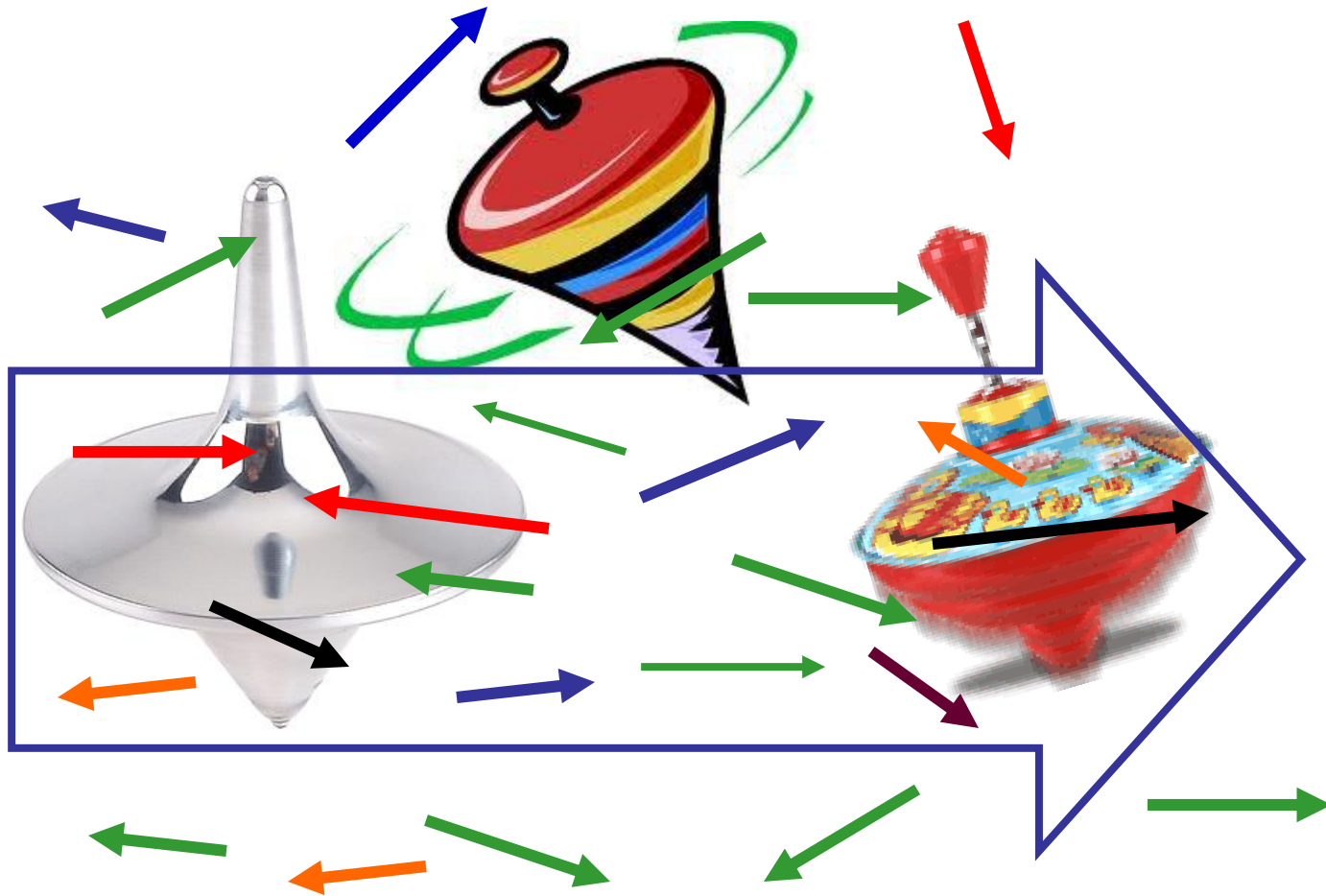
# Troika



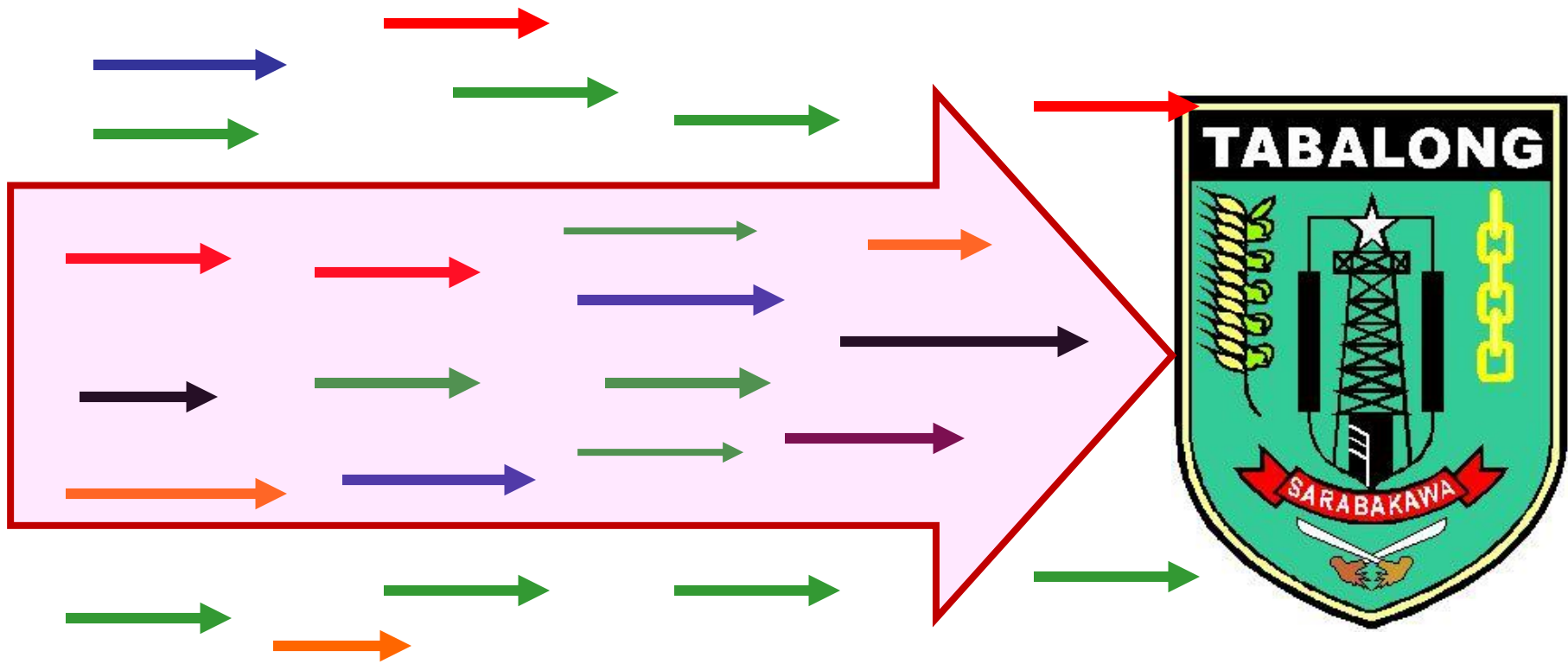
# Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



# Sinergi Stakeholders



# Sinergi *Stakeholders*







# Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019



# Ruang Lingkup Penyelarasan

**Tujuan dan Sasaran RPJMD**



**Sasaran Pokok Pembangunan Nasional**

**Strategi Pembangunan Daerah**



**Tema Pengembangan Wilayah**

**Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**



**Tujuan Pengembangan Wilayah**

# Tema Besar Pembangunan Wilayah Kalimantan

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

# Tujuan Strategis

- Tujuan strategis pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
  1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
  2. Penyediaan infrastruktur wilayah,
  3. Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

# Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



# Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
<b>I. Sasaran Makro</b>				
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

# Sasaran

## Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	5.9	6.0	6.2	7.2	7.9
Kalimantan Tengah	6.1	7.0	7.5	8.2	8.7
Kalimantan Selatan	5.0	6.2	6.8	7.6	8.6
Kalimantan Timur	4.5	5.6	5.6	6.4	7.0
Kalimantan Utara	5.0	5.0	6.0	6.4	6.9

# Sasaran

## Tingkat Kemiskinan Wilayah

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	8.7	8.0	7.4	6.8	6.1
Kalimantan Tengah	6.0	5.8	5.3	4.8	4.3
Kalimantan Selatan	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2
Kalimantan Timur	5.1	4.7	4.3	3.9	3.5
Kalimantan Utara	6.7	6.2	5.7	5.1	4.6



# Sasaran

## Tingkat Pengangguran Wilayah

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Tengah	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Selatan	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4
Kalimantan Timur	8.4	8.0	7.6	7.2	6.9
Kalimantan Utara	7.9	7.6	7.2	6.6	6.3

# Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan

# Perkeretaapian Diperuntukkan Bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Tabalong
1. Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau-Martapura-Bandara Syamsoedin Noor - Banjarmasin 2. Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot 3. Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan 4. Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya		

# Perhubungan Darat

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Tabalong
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin*		

# Perhubungan Udara

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
1. Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam 2. Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin		

# Perhubungan Laut

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin 2. Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku) 3. Pengembangan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan 4. Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin* 5. Pengembangan Pelabuhan Marabatuan		

# JALAN

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin</li><li>2. Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut</li><li>3. Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muning-Kandangan</li><li>4. Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin</li><li>5. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe</li></ol>		

# JALAN

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
6. Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) 7. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari 8. Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah 9. Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin) 10. Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut		



# ASDP

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Tabalong
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*		

# Ketenagalistrikan

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Tabalong
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 MW</li><li>2. PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito) 100 MW</li><li>3. PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Trisakti dan Kayutangi) 100 MW</li><li>4. PLTU Kalsel (FTP2) 2x100 MW</li><li>5. PLTU Kalselteng 2 100 MW</li><li>6. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi</li><li>7. Pembangunan PLTS Komunal</li><li>8. Program Listrik Gratis</li></ol>		

# Telekomunikasi dan Infomatika

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

# Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
1. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai 2. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola 3. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin 4. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar 5. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi) 6. Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin 7. Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap		

# Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
8. Pengendalian Banjir Kandang Jaya 9. Normalisasi Sungai Martapura 10. Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh 11. Pembangunan Waduk Tapin 12. Tanah Bendungan Tapin 13. Pembangunan Embung Tala 14. Pembangunan Embung Tanbu 15. Pembangunan Air Baku Banjar Bakula		

# Pendidikan

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK.</li><li>3. Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK.</li><li>4. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (S1)</li><li>5. Pendidikan keaksaraan dan pendidikan paket A, paket B, dan paket C</li></ol>		

# Kesehatan

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas)</li><li>2. Peningkatan sarana prasarana kesehatan</li><li>3. Bina gizi kesehatan ibu dan anak</li><li>4. Penyehatan lingkungan</li><li>5. BOK</li></ol>		

# Perumahan

RPJMN	RPJMD Kassel	RPJMD Tabalong
1. SPAM Regional Banjarbakula 2. Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB 3. Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar		



# Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
  1. Kedaulatan pangan
  2. Kedaulatan energi
  3. Kemaritiman
  4. Industri/Kawasan Industri
  5. Pariwisata
  6. Revolusi mental
  7. Kawasan Perbatasan



# 1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;  
Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; **Pemda**

Kemendag;  
Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;  
Kemen Perindustrian;  
**Pemda**

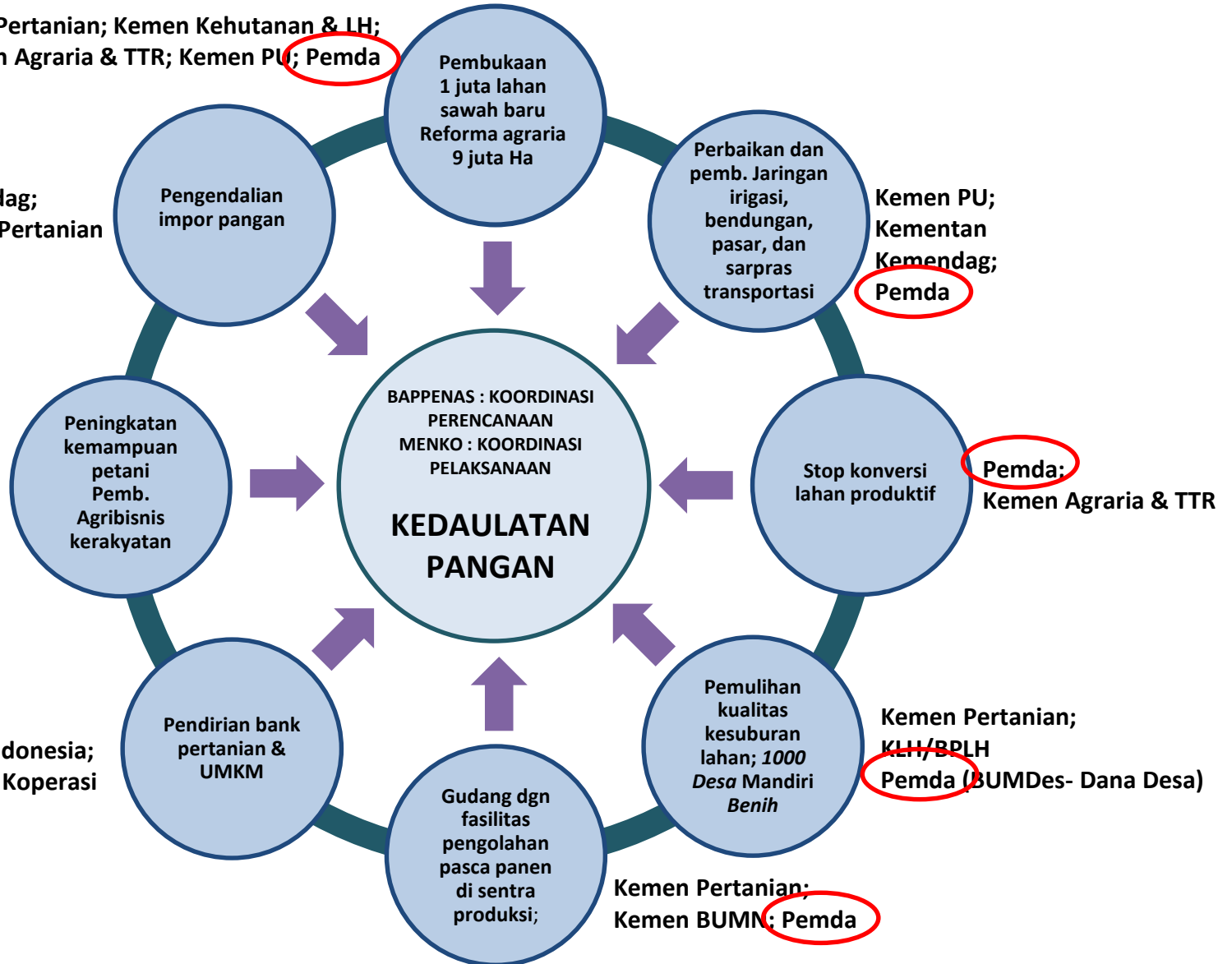
Bank Indonesia;  
Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;  
Kemen BUMN; **Pemda**

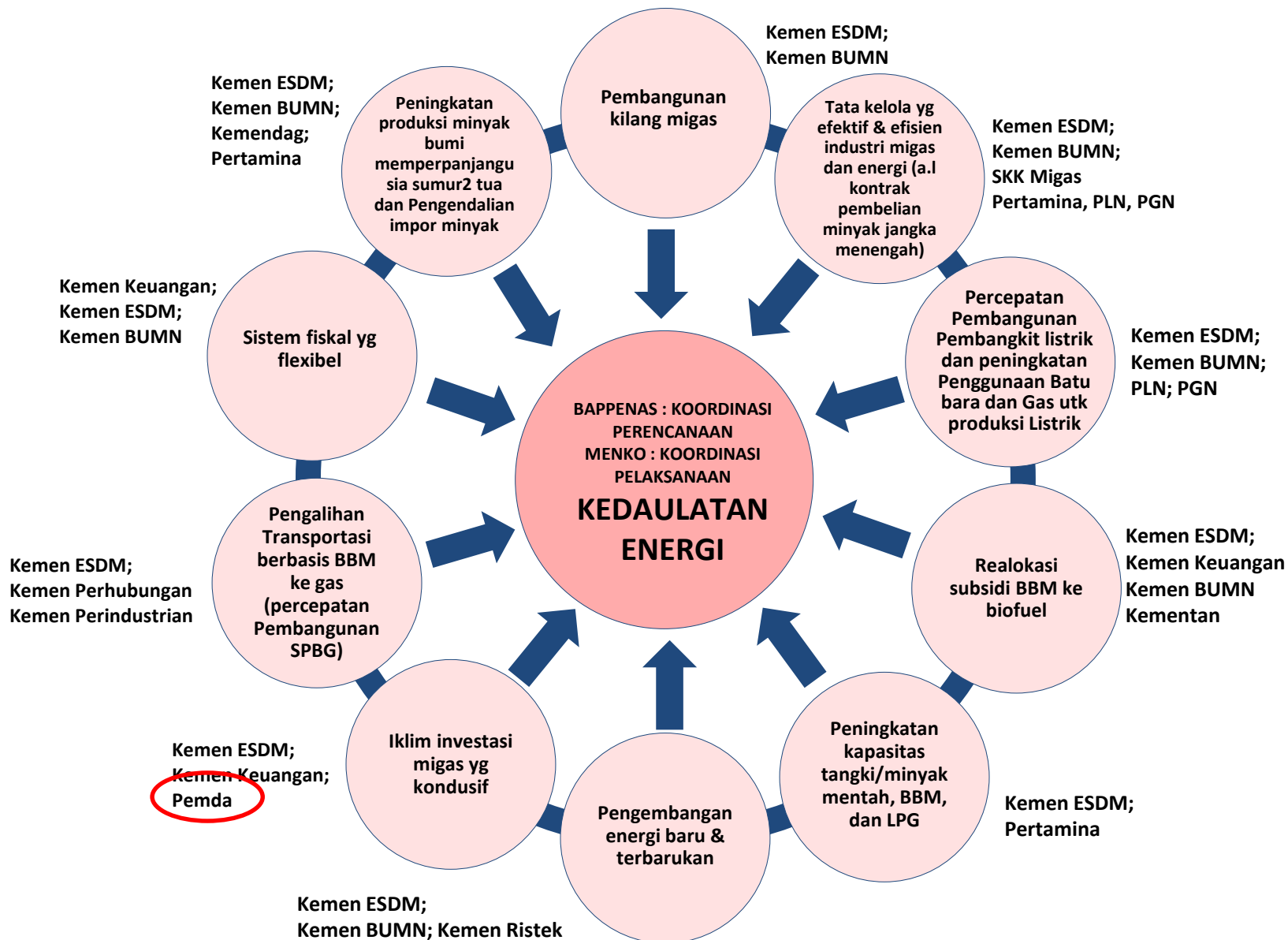
Kemen PU;  
Kementan  
Kemendag;  
**Pemda**

**Pemda**;  
Kemen Agraria & TTR

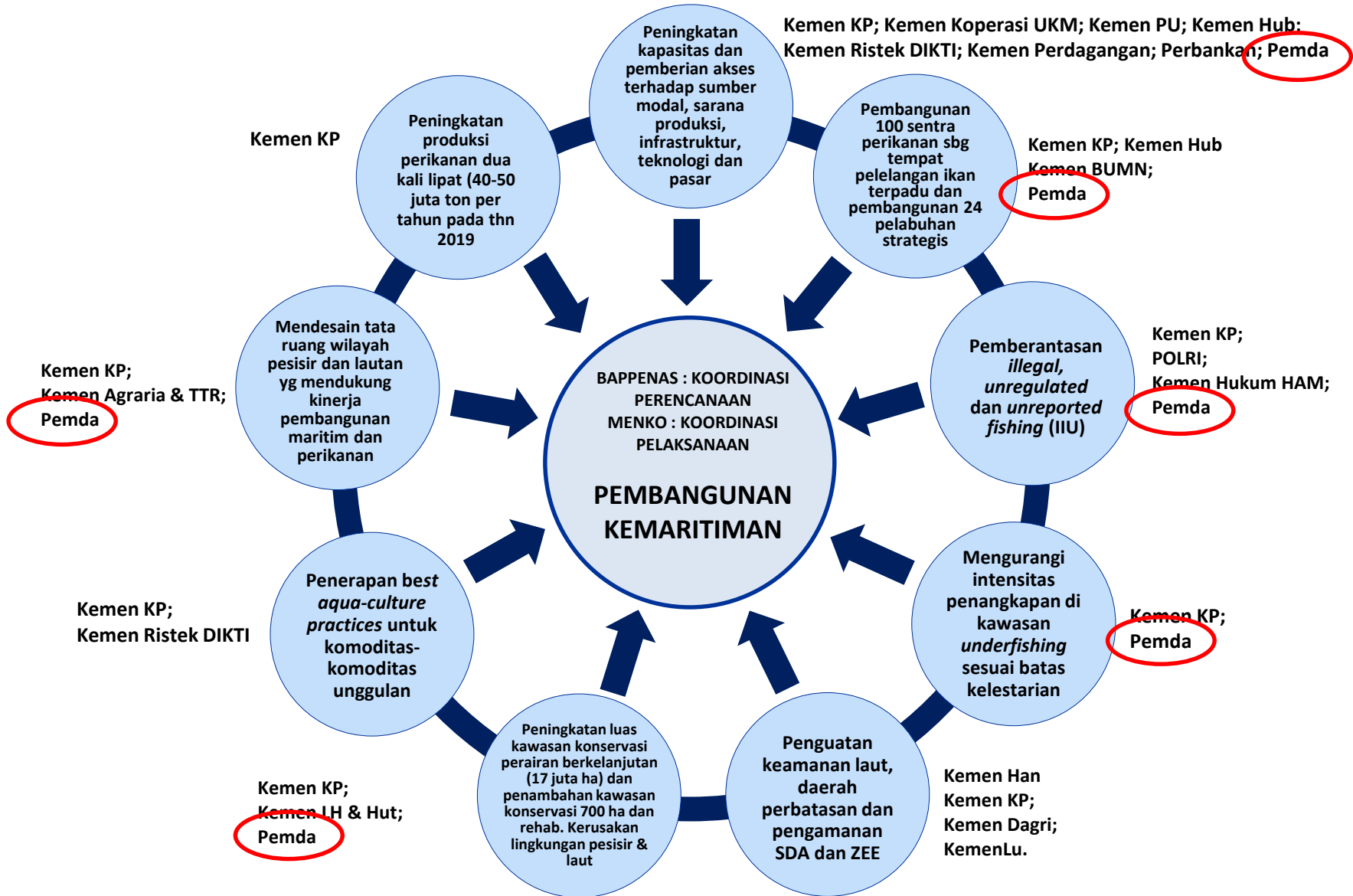
Kemen Pertanian;  
KLH/BPLH  
**Pemda** (BUMDes- Dana Desa)



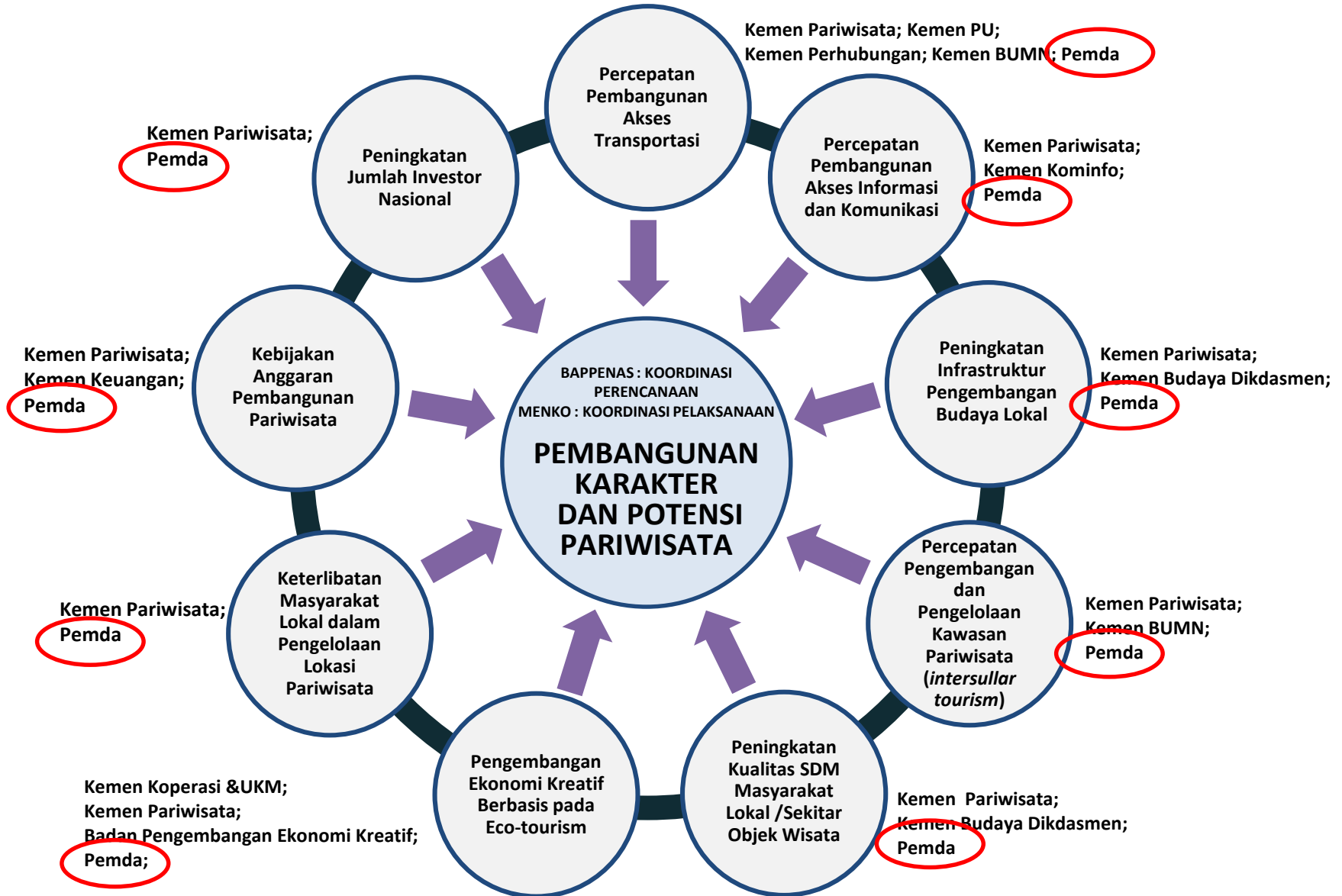
# 2. Kedaulatan Energi



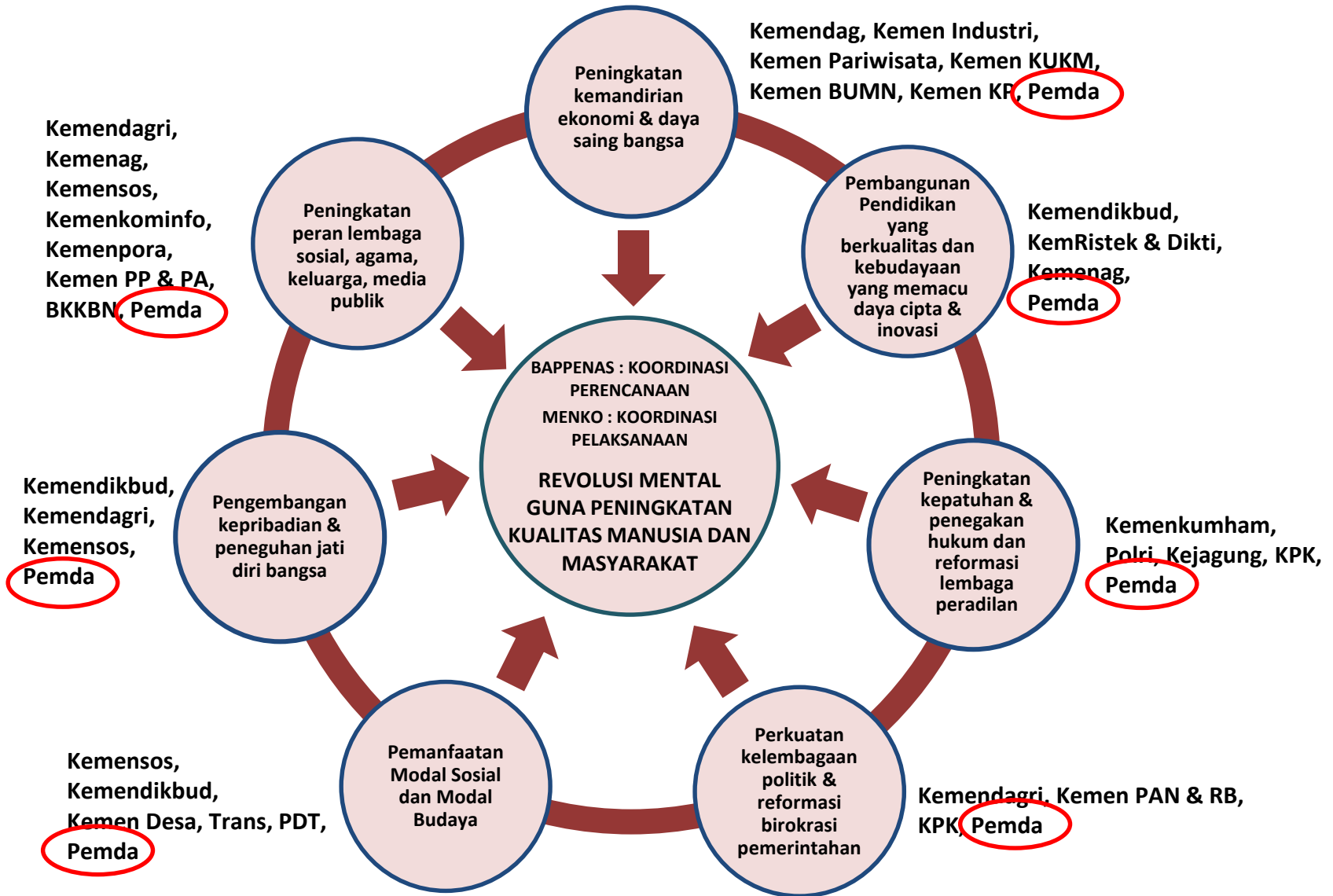
# 3. Kemaritiman



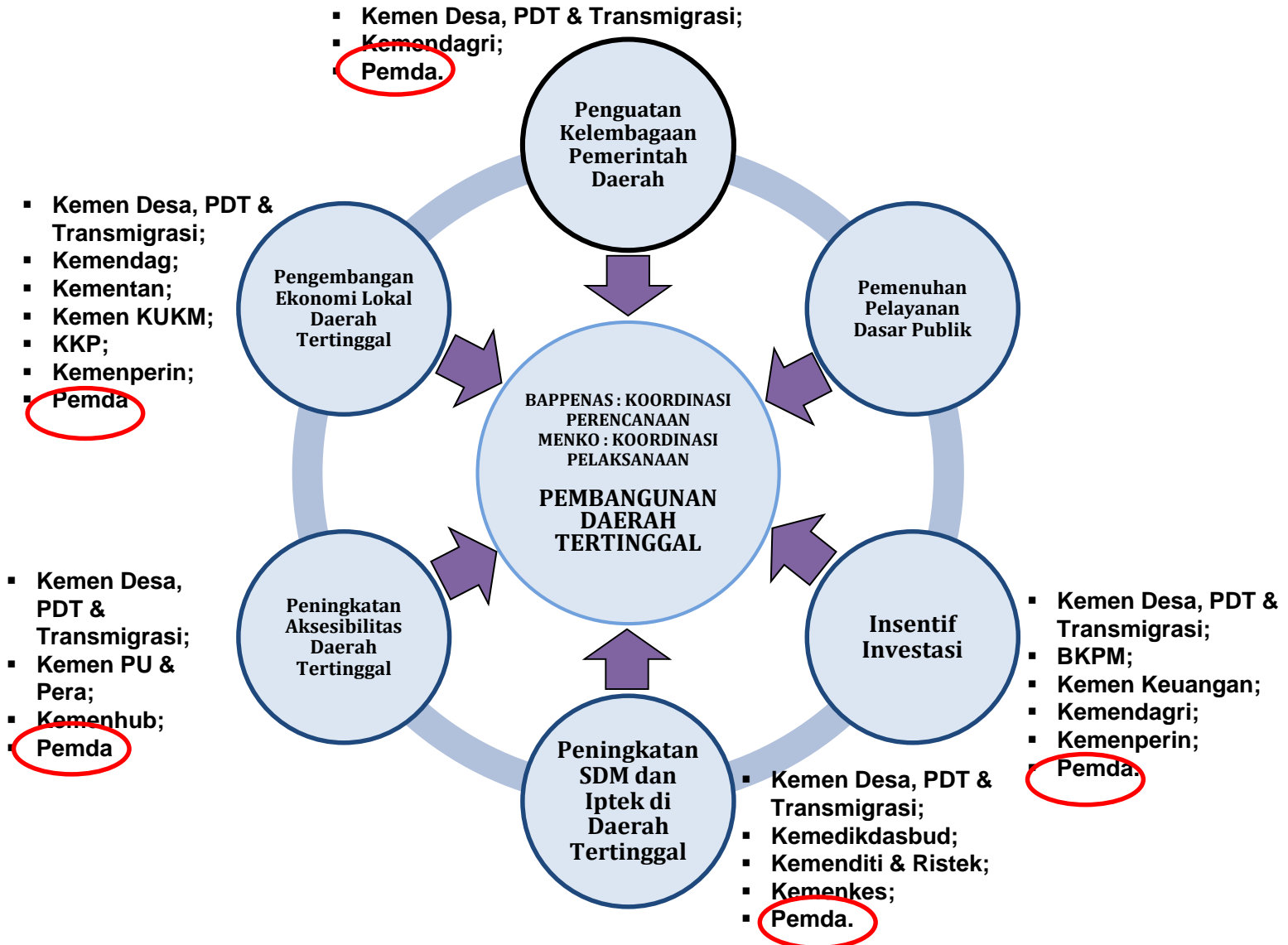
# 5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



# 6. Revolusi Mental



# Pembangunan Daerah Tertinggal



# Terima Kasih

